

# **Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat**

**Hendarmin**

*Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN, Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124  
Alamat Koresponden, Hp: 082150309469/ Email: Hendarmin\_feuntan@gmail.com*

**Abstract** - This study aims to explain the (explanatory), namely a study to examine and explain the influence of exogenous variables on endogenous variables (causal), namely the influence of local government capital and private investment towards the social welfare in West Kalimantan Province through the path of economic growth and employment. This study is characterized by descriptive as well as quantitative research, namely research that aims to giving picture or a characteristic of a particular phenomenon by using the regression equation model Ordinary Least Square (OLS), where relationships between variables in this study suggest a system of simultaneous equations or structural. The secondary data as used in the research such as panel data (the data alliance of time series and cross section) from 12 regency/city of West Kalimantan province during the period 2005- 2009. The research finding indicate that (1) variabel local government capital expenditure has no significant positive effect on economic growth and private investment variables had a significant negative impact on economic growth, (2) variable local government capital expenditures have significant positive effects on employment and private investment variables have a positive effect on employment is not significant, (3) the influence of local government capital expenditure and private investment through economic growth and employment, second variables of economic growth and employment have a significant effect on the welfare of society, but the slope of economic growth shows a negative value.

**Keywords:** *Local government capital expenditure, private investment, economic growth, employment, and social welfare.*

## **I. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).

Dalam hal ini tugas mempertinggi tingkat kesejahteraan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus mampu mendorong dan memberdayakan seluruh komponen masyarakat, khususnya sektor swasta, untuk berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih adil, dan lebih merata akan dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Berikut adalah gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Kalimantan Barat.

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2009**

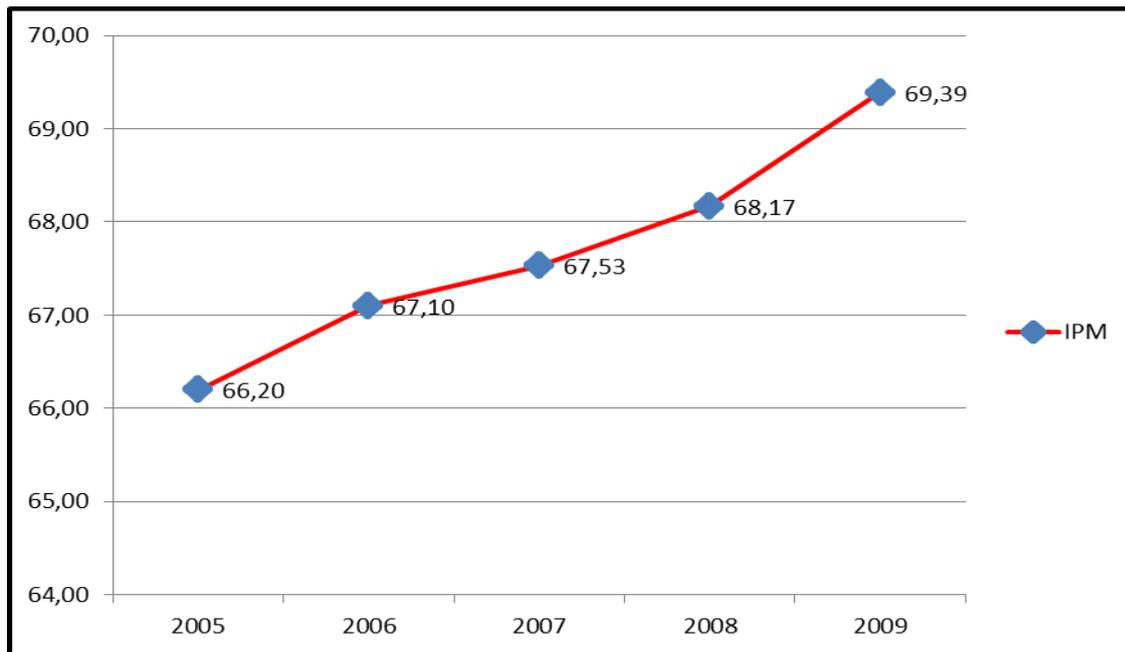
<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Rata-rata</b>
1. Kab. Sambas	5,68	3,95	5,38	5,51	5,43	5,20
2. Kab. Bengkayang	9,07	6,29	6,12	5,77	4,50	6,35
3. Kab. Landak	3,61	4,78	5,13	4,29	4,67	4,50
4. Kab. Pontianak	4,25	6,03	7,01	5,9	1,40	4,92
5. Kab. Sanggau	3,35	8,23	5,48	3,49	5,59	5,23
6. Kab. Ketapang	11,22	13,87	10,14	7,14	-1,22	8,23
7. Kab. Sintang	4,61	5,01	5,16	4,69	5,38	4,50
8. Kab. Kapuas Hulu	0,56	4,07	3,42	3,55	3,70	3,06
9. Kab. Sekadau	5,69	6,19	7,63	5,76	5,35	6,12
10. Kab. Melawi	3,70	4,67	5,44	5,11	4,21	4,63
11. Kota Pontianak	4,81	4,96	5,45	5,72	4,93	5,17
12. Kota Singkawang	6,19	6,33	4,72	5,02	4,88	5,43
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>4,48</b>	<b>5,31</b>	<b>5,47</b>	<b>5,20</b>	<b>4,10</b>	<b>4,91</b>

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2010*

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2009 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir sekitar 4,91 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah pada Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 3,06 persen pertahun. Dan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada Kabupaten Ketapang sebesar 8,23 persen pertahun, besarnya kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang bahkan lebih tinggi hampir 2 kali pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Rendahnya rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kapuas Hulu mungkin disebabkan kurang mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, dan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi ada di Kabupaten Ketapang karena memiliki sumber daya alam yang lebih baik dan mampu mengolahnya secara optimal.

Walaupun hasil pembangunan secara kuantitatif (pertumbuhan ekonomi) telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun jika dilihat lebih lanjut yang sifatnya kualitatif (kualitas pertumbuhan), masih ada berbagai persoalan-persoalan yang muncul dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan, diantaranya adalah tingkat kemiskinan, lonjakan tingkat pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, dan ketidakmerataan baik antar wilayah ataupun antara kelompok masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, oleh sebagian para ahli mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan, sehingga banyak yang mempertanyakan kembali tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak asasinya (Kuncoro, 1997). Oleh karena itu, sasaran pembangunan ekonomi tidak lagi berorientasi pada peningkatan pendapatan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan manusia dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, yang diupayakan dapat berperan dalam pembangunan.



Sumber: data diolah , BPS 2009

**Gambar 1**  
**Perkembangan IPM di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2009**

Gambar 1. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPM dari tahun 2005 sampai 2009. Ini berarti terjadi peningkatan kesejahteraan di provinsi Kalimantan Barat. Walaupun terjadi kenaikan kesejahteraan, namun pergerakannya masih relatif lambat, Dimana indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Kalimantan Barat masuk dalam peringkat ke 29 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2005-2009 di bawah ini.

Pada Tabel 2. terlihat bahwa yang mencapai nilai indeks pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2005-2009**

No	Kab / Kota	IPM				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kab.Sambas	61,9	62,13	63,01	63,73	64,46
2.	Kab.Bengkayang	64,6	65,7	66,32	66,81	67,18
3.	Kab.Landak	64,2	66,08	66,43	66,74	67,21
4.	Kab.Pontianak	66,9	67,19	67,43	67,90	68,41
5.	Kab.Sanggau	66,2	66,98	67,64	67,86	68,19
6.	Kab.Ketapang	65,2	65,4	66,02	66,84	67,41
7.	Kab.Sintang	65,1	65,66	66,89	67,44	68,00
8.	Kab.Kapuas Hulu	68,2	68,7	69,26	69,41	69,79
9.	Kab.Sekadau	64,5	65,29	65,75	66,13	66,63
10.	Kab.Melawi	63,8	65,97	67,61	67,91	68,45
11.	Kota Pontianak	69,5	71,03	71,59	72,08	72,41
12.	Kota Singkawang	64,7	65,46	67,61	68,02	68,47

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten dalam Angka 2010

Peningkatan IPM yang terjadi di kabupaten/kota tidaklah terlalu besar atau signifikan. Dapat kita lihat IPM tertinggi adalah Kota Pontianak yakni mencapai nilai 72,41. Hal ini menandakan bahwa Kota Pontianak cukup sejahtera. Tingginya tingkat indeks Pembangunan Manusia di kota Pontianak dikarenakan kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi dimana tersedia banyak fasilitas kesehatan dan tenaga medis serta fasilitas pendidikan dan tenaga kerja, sehingga kualitas penduduk Kota Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas penduduk yang berada pada kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Indeks Pembangunan Manusia terendah berada pada kabupaten Sambas yakni hanya sebesar 64,46. Hal ini disebabkan luas wilayah kabupaten Sambas sehingga mengakibatkan perhatian pemerintah terhadap kualitas pembangunan manusia rendah.

IPM menjadi sangat penting karena ditekankan pada manusia sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan suatu negara. Jika dapat diketahui pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; maka perbaikan tingkat kesejahteraan akan dapat diakselerasi.

Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah belanja modal pemerintah dan investasi swasta. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang di atas, tergambar pentingnya mengetahui ada tidaknya pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan IPM sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Adapun pertanyaan penelitiannya adalah “Apakah belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja?”

## **Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap kesempatan kerja di Kalimantan Barat?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja di Kalimantan Barat?
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat?
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat?

## II. Rerangka Teori

Teori kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dibedakan menjadi dua (Albert dan Hahnel, 1999), yaitu: teori kesejahteraan sosial dan teori kesejahteraan ekonomi. Teori kesejahteraan sosial dapat digolongkan menjadi *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan pada kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*). Tingkat kesenangan berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya.

*Neoclassical welfare theory* mempopulerkan prinsip *pareto optimality* dalam teori kesejahteraan. Prinsip *pareto optimality* merupakan kondisi tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum, yang juga merupakan fungsi kesejahteraan dari semua kepuasan individu.

Pada hakikatnya, tingkat kesejahteraan secara umum tidak hanya merujuk pada tingkat kesejahteraan secara ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosialnya. Samuelson dalam Swasono (2005:9) menyatakan bahwa:

*Sebenarnya telah ada welfare economics baru yang tidak semata-mata berdasar pada kriteria ekonomi sempit, tetapi telah mengandung nilai-nilai etika. Dengan demikian, dalam tataran sosial welfare, untuk mencapai sosial optimum, perlu mencari pendekatan baru. Artinya, sejak titik tolak awalnya, preferensi individu tidak lagi diasumsikan berdimensi kepentingan tunggal, tetapi sebagai multipartius.*

Beberapa pandangan menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, dibutuhkan perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai sumber daya yang tersedia. Salvatore (1997:412) mengemukakan teori ekonomi kesejahteraan secara mikro, yaitu:

*Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum. Hal ini memerlukan antara lain adalah alokasi optimal faktor produksi di antara konsumen. Alokasi faktor produksi dikatakan pareto optimal jika proses produksi tidak dapat diatur lagi sedemikian rupa guna menaikkan output suatu komoditi tanpa harus mengurangi output komoditi lain.*

Karenanya, teori ekonomi kesejahteraan merupakan cara penyelesaian dari model ekuilibrium umum di mana alokasi faktor produksi di antara komoditi didistribusikan secara optimal.

Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari perbaikan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Todaro (2006:236), secara lebih spesifik mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan (*welfare*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = w(Y, I, P)$$

di mana W adalah kesejahteraan, Y adalah pendapatan per kapita, I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikansi berbeda, dan selayaknya dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang. Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, dapat diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan.

Selanjutnya dalam teori investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan menanamkan dana yang bersumber dari masyarakat atau pemerintah untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya. Penanaman modal yang bersumber dari masyarakat dapat berupa investasi swasta ataupun investasi dari pihak asing; sementara penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja modal.

Pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pentingnya proses pembentukan modal atau investasi merupakan pendekatan paling berpengaruh selama ini. Menurut Sukirno (1999:95) investasi adalah:

*Sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini menunjukkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan.*

Istilah lain dari investasi adalah pemupukan modal (*capital formation*) atau akumulasi modal (*capital accumulation*). Di dalam ilmu ekonomi makro, pengertian investasi tidak sama dengan modal (*capital*). Investasi dalam ekonomi makro memiliki arti lebih sempit, yang secara teknis berarti arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik.

Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (1997:171), model belanja modal pemerintah adalah:

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase inventasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Lebih lanjut, Wagner dalam Mangkoesobroto (1997:172) menyebutkan bahwa: "dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat".

Tumbuhnya perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat semakin kompleks. Sehingga peranan pemerintah menjadi sangat penting, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Menurut Mangkoesobroto (1997:2): "peranan pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta".

### III. Metode Penelitian

#### Rancangan Penelitian

Penelitian ini berbasis pada menjelaskan (*explanatory*), yaitu penelitian untuk menguji dan menjelaskan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen (sebab-akibat).

#### Sumber Data

Unit pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersifat makro, meliputi data tahunan dari 14 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat, dengan periode pengamatan selama lima tahun terakhir; yang berarti jumlah data yang dikumpulkan adalah sekitar 70 unit (data panel). Data yang digunakan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dan publikasi lain seperti Laporan Keuangan Daerah berbagai tahun.

## Variabel Penelitian

Variabel di dalam penelitian ini dikelompokkan atas variabel eksogen, variabel *intervening*, dan variabel endogen. Variabel eksogen meliputi:

1. Belanja modal pemerintah daerah ( $X_1$ )
2. Investasi swasta ( $X_2$ ).

Variabel *intervening* meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ )
2. Kesempatan kerja ( $Y_2$ ).

Sementara variabel endogen meliputi:

1. Kesejahteraan masyarakat ( $Y_3$ ).

Adapun model dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan suatu sistem persamaan simultan atau struktural, dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{1it} &= \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} \\ \hat{Y}_{2it} &= \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} \\ \hat{Y}_{3it} &= \delta_0 + \delta_1 \hat{Y}_{1it} + \delta_2 \hat{Y}_{2it}\end{aligned}$$

di mana:  $X_1$  = Belanja Modal Pemerintah Daerah  
 $X_2$  = Investasi Swasta  
 $Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi  
 $Y_2$  = Kesempatan Kerja  
 $Y_3$  = Kesejahteraan Masyarakat

## IV. Penyajian Data dan Diskusi

### Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat

Adapun hasil pengolahan data untuk melihat pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat**

Dependent Variable: Y1?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Sample: 2005 2009  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 11  
 Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.741018	0.935418	8.275465	0.0000
X1?	2.45E-07	4.47E-06	0.054756	0.9566
X2?	-4.94E-06	1.64E-06	-3.018763	0.0043

Fixed Effects (Cross)			
_SBS--C	-2.422471		
_BKY--C	-1.225446		
_LDK--C	-2.690748		
_PTK--C	2.044945		
_SGU--C	5.783980		
_KTP--C	4.603761		
_STG--C	4.040756		
_KPH--C	-3.868980		
_SKD--C	-1.456590		
_MLW--C	-3.139624		
_KPT--C	-1.669584		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.427009	Mean dependent var	5.306909
Adjusted R-squared	0.263297	S.D. dependent var	2.287856
S.E. of regression	1.963699	Akaike info criterion	4.390601
Sum squared resid	161.9568	Schwarz criterion	4.865061
Log likelihood	-107.7415	Hannan-Quinn criter.	4.574079
F-statistic	2.608294	Durbin-Watson stat	1.685998
Prob(F-statistic)	0.010820		

Sumber : Data olahan Eviews

Secara keseluruhan (*overall*) terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,0108 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Nilai *R-squared* yang sebesar 0,4270 menunjukkan bahwa hanya 42,70 persen variasi pada variabel belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi; sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan besar pengaruh variabel belanja modal pemerintah dan investasi swasta selama periode 2005-2009 adalah sebesar 42,70 persen, sementara sisanya sebesar 57,30 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian secara individu (*partial*) menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan nilai yang positif, tetapi tidak signifikan yang ditunjukkan dari nilai *prob(t-statistic)* 0,9566 yang lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama periode 2005-2009 bahwa belanja modal pemerintah yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat seperti infrastruktur/sarana dan pelayanan publik tidak berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah belanja modal yang dibelanjakan pemerintah daerah tidak menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sementara variabel investasi swasta menunjukkan pengaruh yang signifikan yang dilihat dari nilai *prob(t-statistic)* 0,0034 yang lebih kecil dari alpha 0,05; namun koefisiennya menunjukkan besaran yang negatif, yang berarti bila investasi swasta meningkat sebesar 1 milyar rupiah, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0049 persen. Hal ini cenderung untuk bertolak belakang dengan teori ekonomi, dimana investasi cenderung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan hal ini terjadi karena investasi yang dilakukan di Kalimantan Barat cenderung untuk jangka waktu yang relatif lama seperti investasi di bidang perkebunan sawit yang banyak ditemukan di setiap daerah kabupaten di Kalimantan Barat, sehingga dampaknya terhadap perekonomian baru dapat dirasakan lima sampai sepuluh tahun ke depan.

## Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kalimantan Barat

Adapun hasil pengolahan data untuk melihat pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 4. berikut :

**Tabel 4.**  
**Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja di Kalimantan Barat**

Dependent Variable: Y2?				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2005 2009				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 11				
Total pool (balanced) observations: 55				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6836.694	4503.098	1.518220	0.1365
X1?	0.065800	0.021500	3.059716	0.0039
X2?	0.000868	0.007875	0.110186	0.9128
Fixed Effects (Cross)				
_SBS--C	2089.863			
_BKY--C	-3815.847			
_LDK--C	-12513.28			
_PTK--C	20749.06			
_SGU--C	17888.14			
_KTP--C	1945.746			
_STG--C	4665.642			
_KPH--C	-9615.667			
_SKD--C	-10578.39			
_MLW--C	-3582.972			
_KPT--C	-7232.289			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.675704	Mean dependent var	16192.49	
Adjusted R-squared	0.583048	S.D. dependent var	14639.88	
S.E. of regression	9453.242	Akaike info criterion	21.34917	
Sum squared resid	3.75E+09	Schwarz criterion	21.82363	
Log likelihood	-574.1021	Hannan-Quinn criter.	21.53264	
F-statistic	7.292604	Durbin-Watson stat	1.936139	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Sumber : Data olahan Eviews

Secara keseluruhan (*overall*) terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap kesempatan kerja di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Nilai *R-squared* yang sebesar 0,6757 menunjukkan bahwa sebesar 67,57 persen variasi pada variabel belanja

modal pemerintah dan investasi swasta yang dapat menjelaskan variasi variabel kesempatan kerja; sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan besar pengaruh variabel belanja modal pemerintah dan investasi swasta selama periode 2005-2009 adalah sebesar 67,57 persen, sementara sisanya sebesar 33,43 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian secara individu (*partial*) menunjukkan bahwa koefisien belanja modal pemerintah menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang ditunjukkan dari nilai *prob(t-statistic)* 0,0039 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama periode 2005-2009 bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja; dengan kata lain bila belanja pemerintah meningkat sebesar 1 milyar rupiah, maka akan meningkatkan kesempatan kerja sebanyak 66 orang. Begitu juga dengan variabel investasi swasta yang menunjukkan koefisien yang positif, namun tidak signifikan secara statistik yang dilihat dari nilai *prob(t-statistic)* 0,9128 yang lebih besar dari alpha 0,05. Ini berarti pihak swasta selama periode 2005-2009 tidak berperan terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kalimantan Barat.

### **Pengaruh Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Barat**

Adapun hasil pengolahan data untuk melihat pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat dilihat pada tabel 5. berikut:

**Tabel 5.**  
**Pengaruh Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Barat**

Dependent Variable: Y3?

Method: Pooled Least Squares

Sample: 2005 2009

Included observations: 5

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.23887	0.721841	90.37846	0.0000
Ŷ1?	-0.227070	0.104001	-2.183337	0.0346
Ŷ2?	0.000178	2.10E-05	8.448813	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_SBS—C	-3.518940			
_BKY—C	0.347106			
_LDK—C	1.281323			
_PTK—C	-3.139848			
_SGU—C	-2.694905			
_KTP—C	-1.656079			
_STG—C	-1.335113			
_KPH—C	3.022173			
_SKD—C	1.415304			
_MLW—C	0.383224			
_KPT—C	5.895756			

## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.939134	Mean dependent var	66.91218
Adjusted R-squared	0.921744	S.D. dependent var	2.185680
S.E. of regression	0.611428	Akaike info criterion	2.057026
Sum squared resid	15.70148	Schwarz criterion	2.531487
Log likelihood	-43.56822	Hannan-Quinn criter.	2.240504
F-statistic	54.00353	Durbin-Watson stat	1.663875
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Olahan Eviews

Secara keseluruhan (*overall*) terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel prediksi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,00 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Nilai *R-squared* yang sebesar 0,9391 menunjukkan bahwa sebesar 93,91 persen variasi pada variabel prediksi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat menjelaskan variasi variabel kesejahteraan masyarakat; sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan besar pengaruh variabel prediksi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja selama periode 2005-2009 adalah sebesar 93,91 persen, sementara sisanya sebesar 06,09 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian secara individu (*partial*) menunjukkan bahwa koefisien prediksi pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang signifikan yang ditunjukkan dari nilai *prob(t-statistic)* 0,0346 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa selama periode 2005-2009 bahwa modal pemerintah dan investasi swasta melalui jalur pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat; namun koefisiennya menunjukkan nilai yang negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dan swasta melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi justru dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemungkinan prediksi adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya menambah kesenjangan di antara kelompok masyarakat; dengan kata lain yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi karena adalah belanja modal pemerintah dan investasi swasta hanya pada kelompok tertentu, dan hanya menambah ketidakmerataan kesejahteraan. Faktor lain kemungkinannya adalah biaya pendidikan dan kesehatan yang cenderung lebih meningkat dibanding dengan peningkatan pendapatan. Ini berarti peningkatan pendapatan masyarakat masih belum mengimbangi tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk variabel prediksi kesempatan kerja, pengujian secara individu (*partial*) menunjukkan bahwa koefisiennya menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang ditunjukkan dari nilai *prob(t-statistic)* 0,0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa selama periode 2005-2009 bahwa modal pemerintah dan investasi swasta melalui jalur kesempatan kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat; yang berarti bila kesempatan kerja meningkat sebanyak 1000 orang, maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,18 poin; dan sebaliknya penurunan kesempatan kerja sebanyak 1000 orang akan juga menurunkan nilai IPM sebesar 0,18 poin.

Analisis dengan melihat besaran koefisien dan signifikansi melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui jalur kesempatan kerja. Artinya ketersediaan kesempatan kerja bagi masyarakat adalah penting untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, kesempatan kerja tersebut dapat diciptakan melalui belanja modal pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan kesempatan kerja masyarakat selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk berperan aktif melalui kebijakan belanja modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## V. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya variabel investasi swasta yang memiliki pengaruh signifikan namun koefisiennya berslope negatif (bertolak belakang dengan teori ekonomi); sementara variabel belanja modal pemerintah daerah walaupun memiliki slope positif (sesuai dengan teori ekonomi) namun tidak signifikan.
2. Terhadap kesempatan kerja, hanya variabel belanja modal yang memiliki pengaruh signifikan dan memiliki koefisien yang positif (sesuai teori); sementara variabel investasi swasta walaupun memiliki slope positif (sesuai teori) namun tidak signifikan.
3. Terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh belanja modal pemerintah daerah dan investasi swasta melalui jalur pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kedua variabel pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun slope dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif (tidak sesuai teori).
4. Secara umum, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kalimantan Barat jalur yang dapat digunakan adalah peningkatan belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Saran

1. Karena belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat, seyogyanya pemerintah melalui kebijakan anggaran belanja sedapat mungkin menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya.
2. Investasi swasta tidak hanya semata bertujuan mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi harus diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

## REFERENSI

- Albert, Michael and Robin Hahnel. 1999. *Marxism and Socialist Theory: Socialism in Theory and Practice*.
- Guritno Mangkoesobroto. 1997. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Teori Mikroekonomi (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Swasono, Sri Edi. 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Sukirno, Sadono. 1999. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE-UI.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Alih Bahasa: Munandar dan Puji. Jakarta: Erlangga.